

ABSTRAK

Fahrian Alwarits (NIM 1158010095) Implementasi Kebijakan Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya Dan Beracun (Studi Kasus Di Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Bekasi)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah Kota/Kabupaten mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Permasalahan yang diteliti adalah implementasi kebijakan izin pengelolaan limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun (studi kasus di tempat pembuangan akhir Burangkeng Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi), tujuan penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui tentang implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Burangkeng.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif*. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi terhadap pengelolaan sampah yang dijadikan sebagai data awal, wawancara dengan pihak berkompeten dalam bidang pengelolaan sampah, dan studi dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang pengelolaan sampah data dianalisis secara *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan izin pengelolaan limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun (studi kasus di tempat pembuangan akhir Burangkeng Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang izin pengelolaan limbah padat non B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) khususnya Pasal 2 dan 3 Ayat (1), tetapi dalam pelaksanaanya adanya faktor kendala yang terletak pada sistem teknologi untuk peleburan sampah dan pengelolaan sampah yang belum maksimal, anggaran dan pembebasan lahan yang belum teralisasi, masih menerapkan sistem *open dumping* yang membuat pencemaran lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, pengelolaan.

ABSTRACT

Fahrian Alwarits (NIM 1158010095) Implementation of a Solid Waste Management Permit Policy Not Derived from Hazardous and Toxic Materials (Case Study in Burangkeng Final Disposal of the Sanitation and Landscaping Service of Bekasi Regency

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (1) contains provisions that a good and healthy environment is a human right and constitution for every citizen of Indonesia. The mandate of the Constitution provides consequences that the City / Regency government has the authority to carry out waste management. The problem studied was the implementation of the policy on the management of solid waste not from hazardous and toxic materials (case study in the Burangkeng final disposal site of the Bekasi District Sanitation and Landscaping Office), the purpose of this thesis research was to know about the implementation of policies on waste management and efforts to overcome constraints that occur in implementing policies in waste management in Burangkeng landfills.

This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. Data is taken from two sources, namely primary sources and secondary data sources. The method of collecting data uses observations on waste management which are used as initial data, interviews with competent parties in the field of waste management, and documentation studies are data obtained through literature related to waste management data analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, the implementation of the policy on the management of solid waste does not come from hazardous and toxic materials (case studies in Burangkeng landfill at the Bekasi District Sanitation and Landscaping Agency are in accordance with the Bekasi Regency Regional Regulation Number 9 of 2007 concerning waste management permits). non-B3 solids (Hazardous and Toxic Materials), especially Article 2 and 3 Paragraph (1), but in the implementation there are constraints which lie in the technology system for waste smelting and waste management that has not been maximized, the budget and land acquisition that have not been realized, still apply open dumping system that makes environmental pollution.

Keywords: Implementation, Policy, management.